



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Soekarno Hatta Nomor 576 Telepon +62 22 756 2048 Faksimil +62 22 756 2049

website <http://www.esdm.jabarprov.go.id/> - e-mail: admin.esdm@jabarprov.go.id

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI (RUED-P) JAWA BARAT

Ir. Eddy IM Nasution, Dipl, SE., MT.,

PENDAHULUAN

2

20/09/2016

- Positioning Jawa Barat dalam dinamika pembangunan nasional dan global khususnya yang terkait dalam kebijakan energi
- Pendekatan dalam penyusunan rencana umum energi daerah bukan hanya tentang masalah “supply”, “demand”, dan “harga”, tetapi mempertimbangkan masalah “global warming”, “sustainable development” dan “arah dan “kebijakan pembangunan nasional”
- Energi tidak diposisikan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi sebagai instrumen dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
- Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2015 sekitar 46 juta jiwa, dimana 65 % tinggal kawasan perkotaan, merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
- Jawa Barat salah satu dari 3 (tiga) provinsi di Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian nasional, khususnya di sektor industri manufacture dan penyediaan pangan nasional.
- Dengan kondisi tersebut diatas penyusunan draft RUED-P kedepan diharapkan dapat memperkuat daya saing perekonomian Jawa Barat, pemenuhan akan kebutuhan dasar dibidang energi dan memperkuat keberlanjutan pembangunan Jawa Barat berbasis lingkungan dan kearifan lokal



Permasalahan di Jawa Barat

Potensi energi fosil yang terbatas

Ketergantungan dan konsumsi energi fosil sangat tinggi (Volume Transportasi dan industri),

Infrastruktur keenergian umumnya dimiliki negara dengan aksesibilitas pengendalian sangat terbatas (Jaringan Jamali, Pipa & Gas dll)

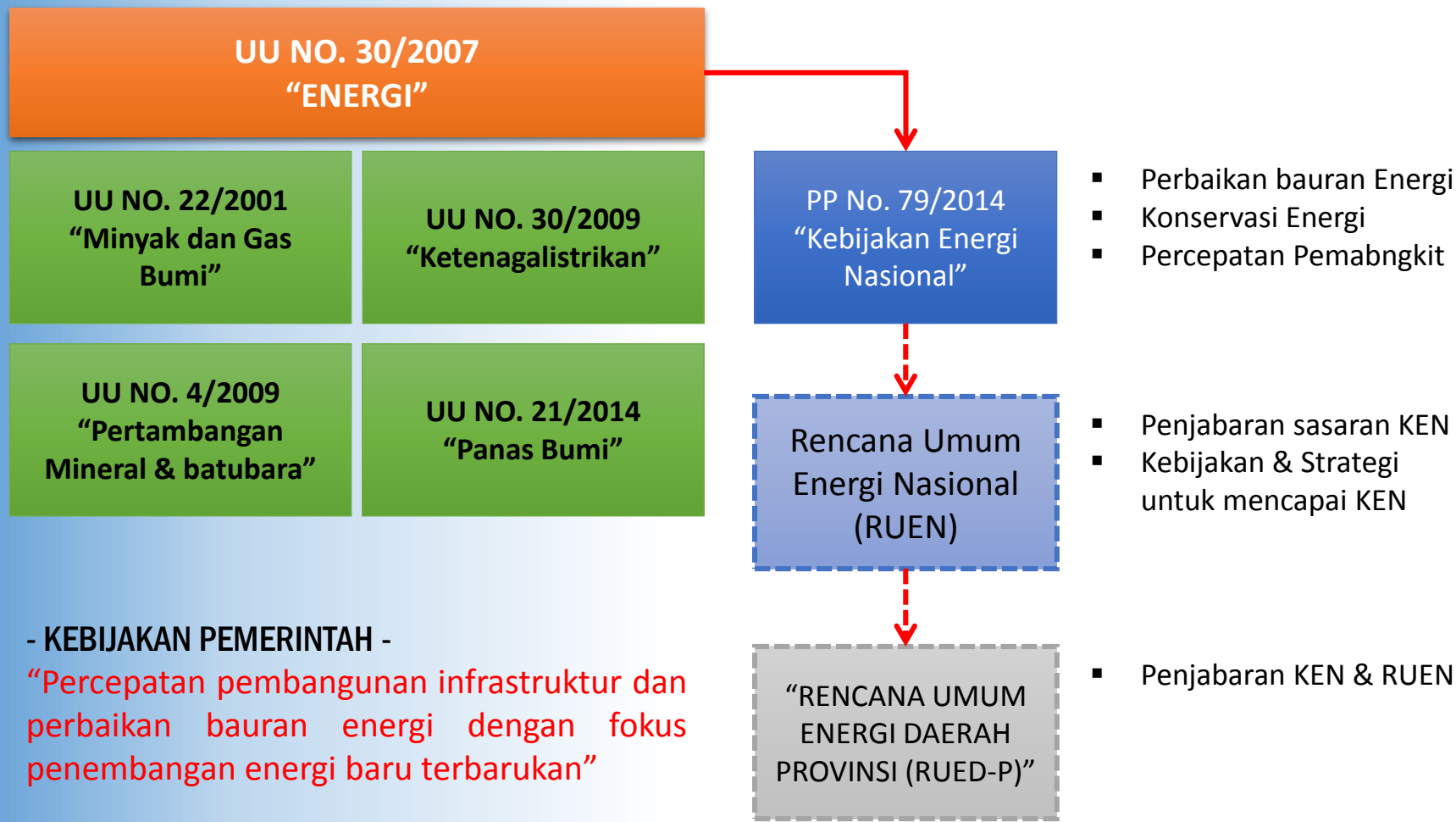
Harga komoditas energi tidak dikendalikan pemerintah provinsi

Impact kerusakan lingkungan tanpa adanya “*environment recovery cost*”

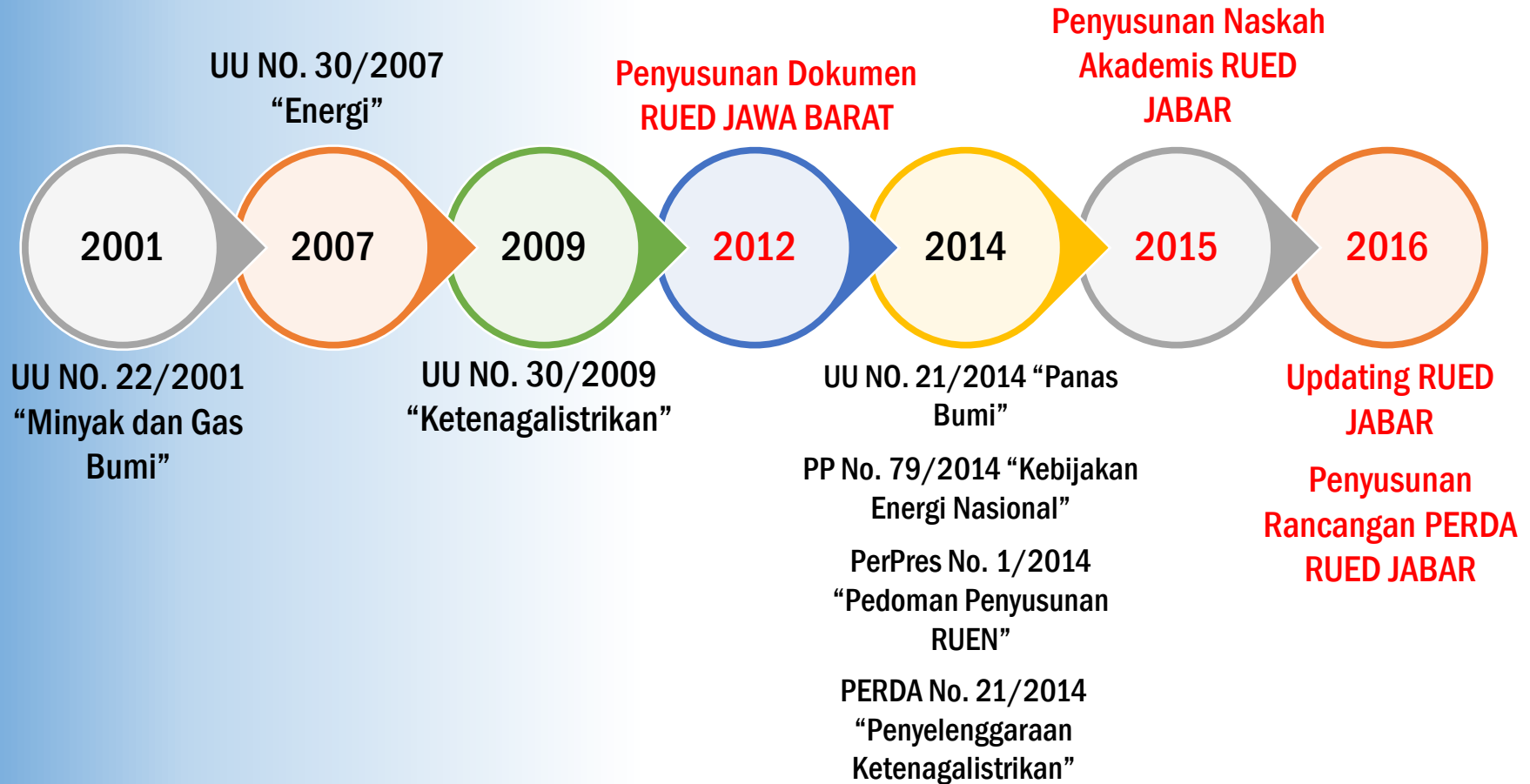
Kewenangan pengelolaan potensi energi terbesar (panas bumi) tidak dilaksanakan pemerintah provinsi



Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral



KRONOLOGIS PENYUSUNAN RUED-P JAWA BARAT



Paradoks Pengelolaan Energi

Kaya dengan Sumber Daya Energi Baru Terbarukan (EBT), tetapi focus pada energy fosil yang cadangannya sudah pasti akan habis...

Negara Net importir minyak dengan perilaku konsumsi boros, tetapi disubsidi oleh negara...

Sejak 2008 telah menjadi Net Importir Migas, tapi masih merasa kaya migas...

Cadangan migas terus menurun, lifting tidak pernah mencapai target namun tidak melakukan eksplorasi secara serius...

Cadangan batubara hanya 5,7% dari cadangan dunia, tetapi menjadi eksportir batubara terbesar didunia...

Banyak Aspek harus dibenahi dalam pengelolaan energy, tapi tenggelam dalam diskursus tentang harga BBM...

Kebijakan Energi Nasional menempatkan energi sebagai modal pembangunan nasional (bukan komoditas), tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya berjalan...



KONDISI ENERGI DAERAH SAAT INI & EKSPEKTASI MASA MENDATANG



Migas



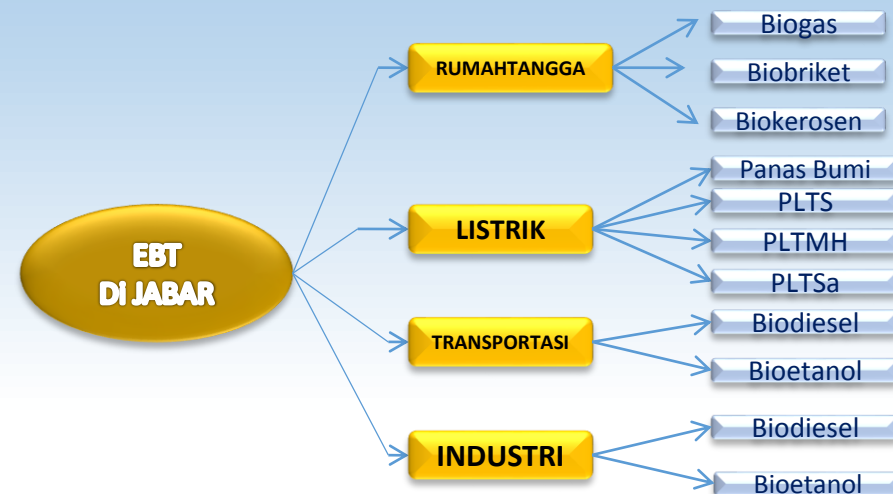
- $\pm 5,6$ MW

- 4,8 Kwh/m²/hari

- Pantai Selatan Jawa Barat ; 4 m/detik.

- **Setara $\pm 300.000 \text{ M}^3/\text{Hari}$ Gas Methane 70 %, dari ternak sapi sejumlah ± 300.000 ekor sapi.**

- Sampah 20.000 M³/Hari, (Cekungan Bandung)

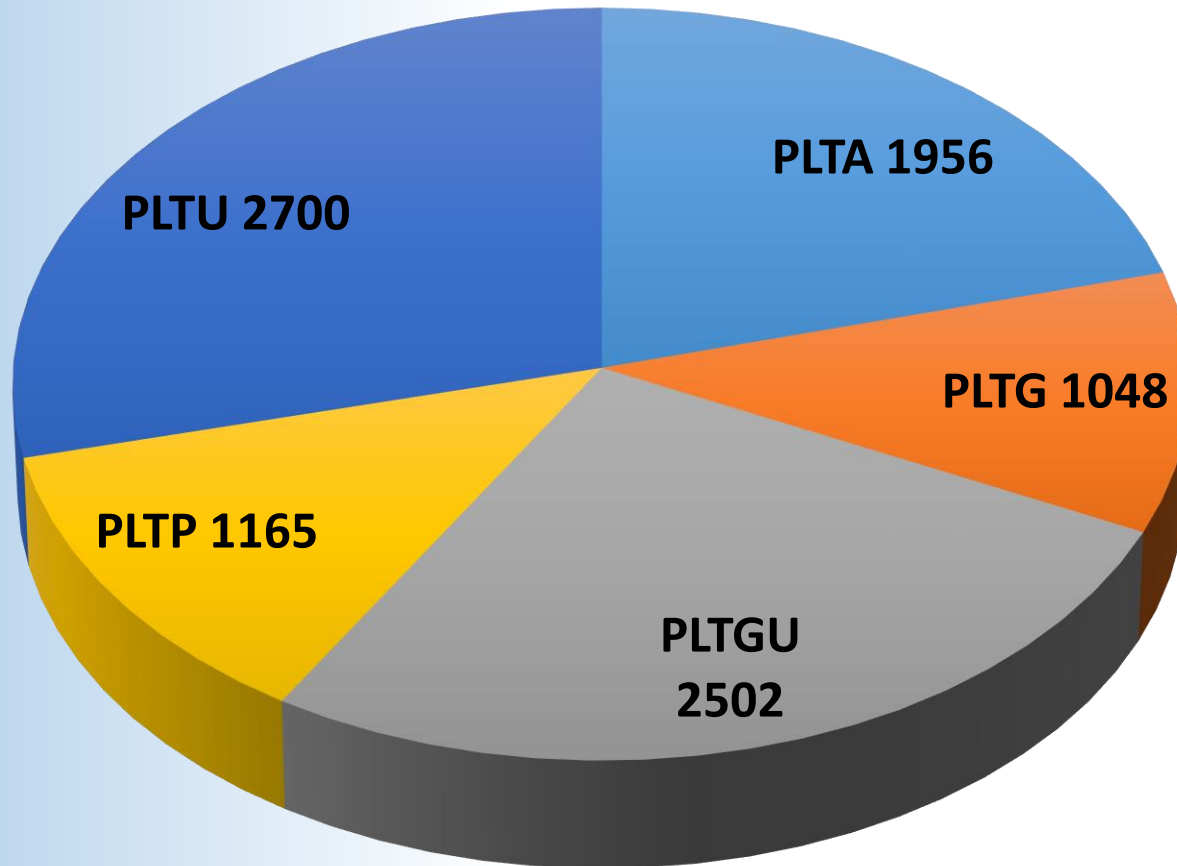


Energi Daerah (RUED) Jawa Barat

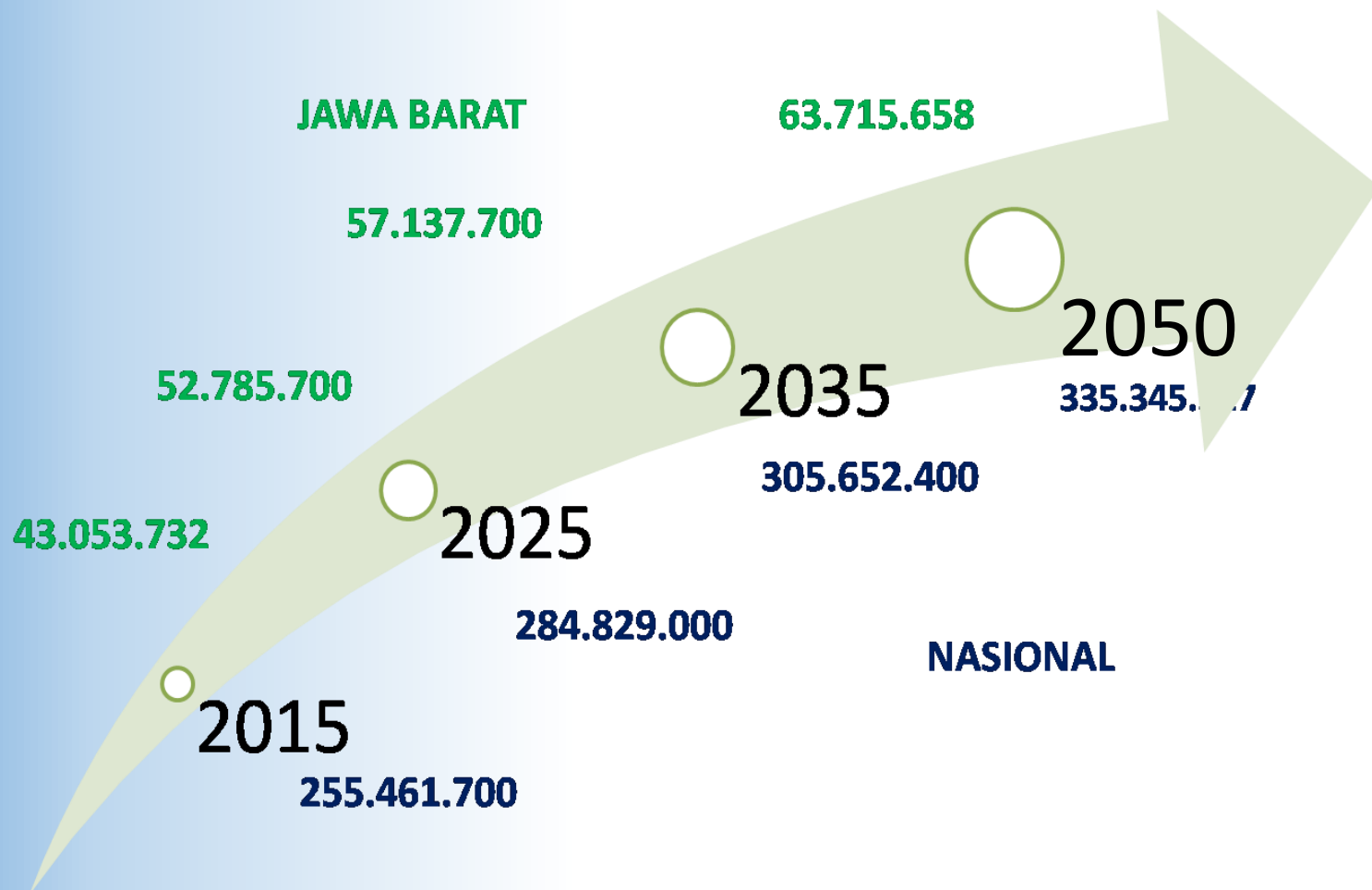
PENGUNAAN

JENIS EBT

Sebaran dan jumlah kapasitas pembangkit listrik di Jawa Barat (MW)

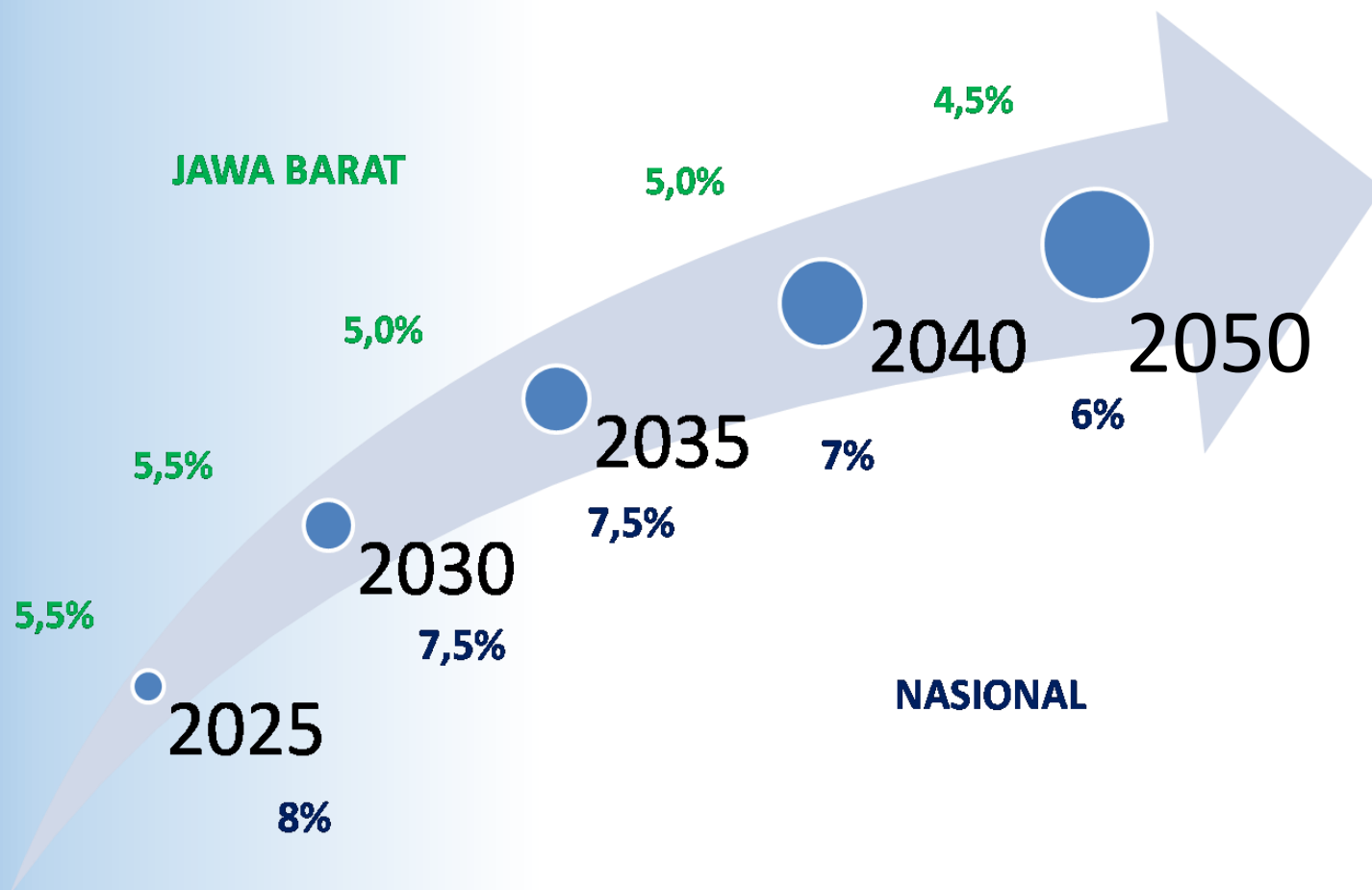


Proyeksi Pertumbuhan Penduduk



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ENERGI ADA UNTUK SEMUA

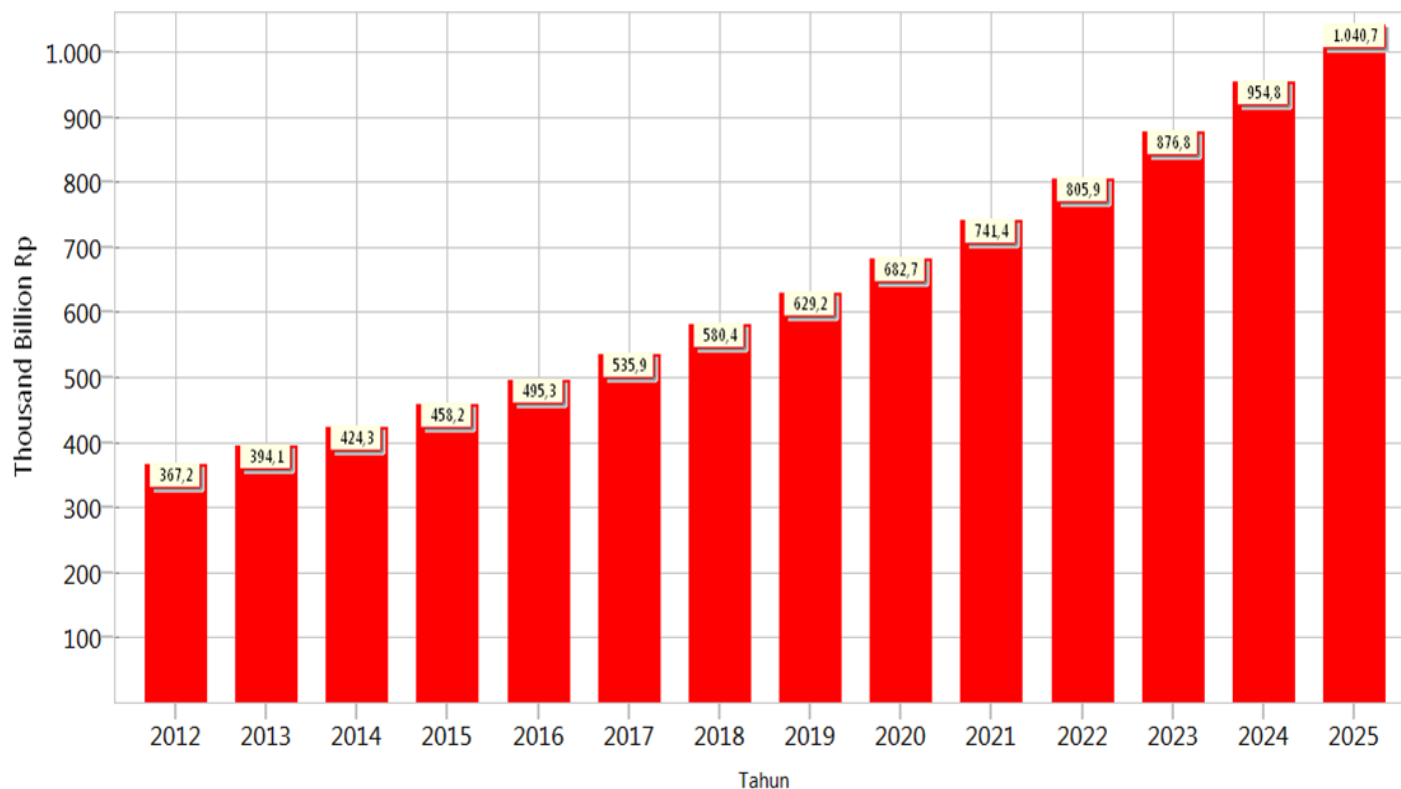
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ENERGI ADA UNTUK SEMUA

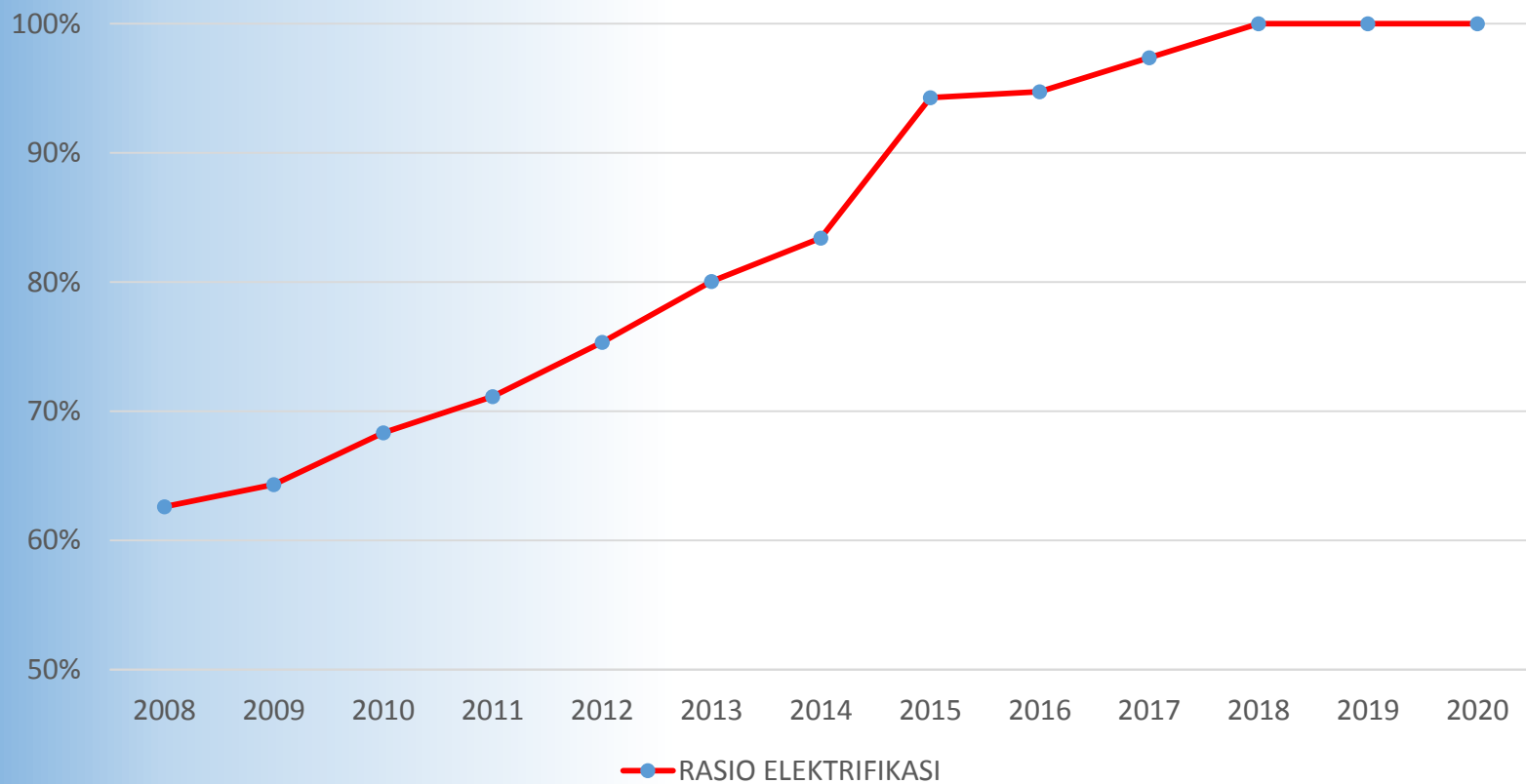
Proyeksi PDRB Konstan

Proyeksi PDRB Jawa Barat atas Harga Konstan
dalam milyar Rupiah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ENERGI ADA UNTUK SEMUA

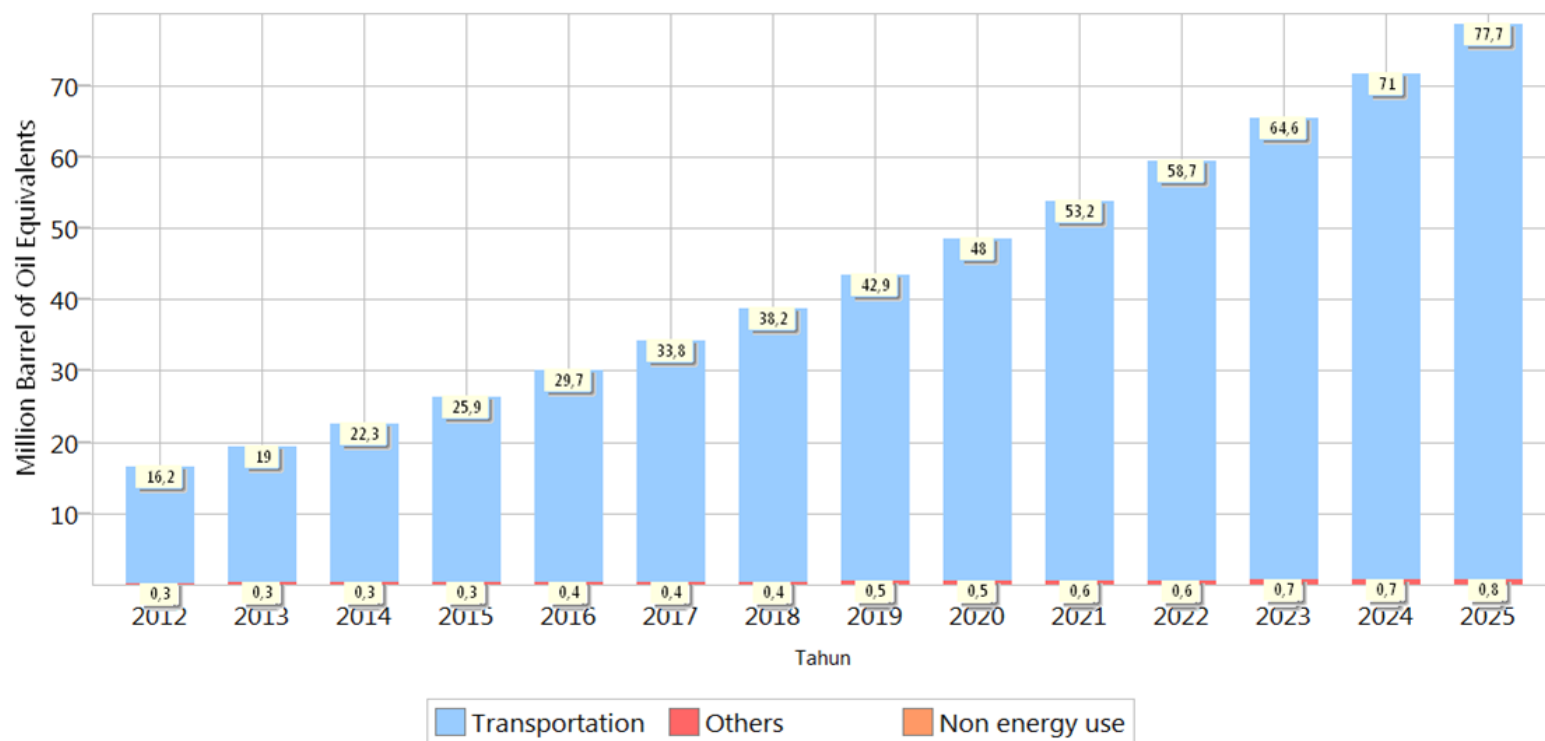
Proyeksi Rasio Elektrifikasi



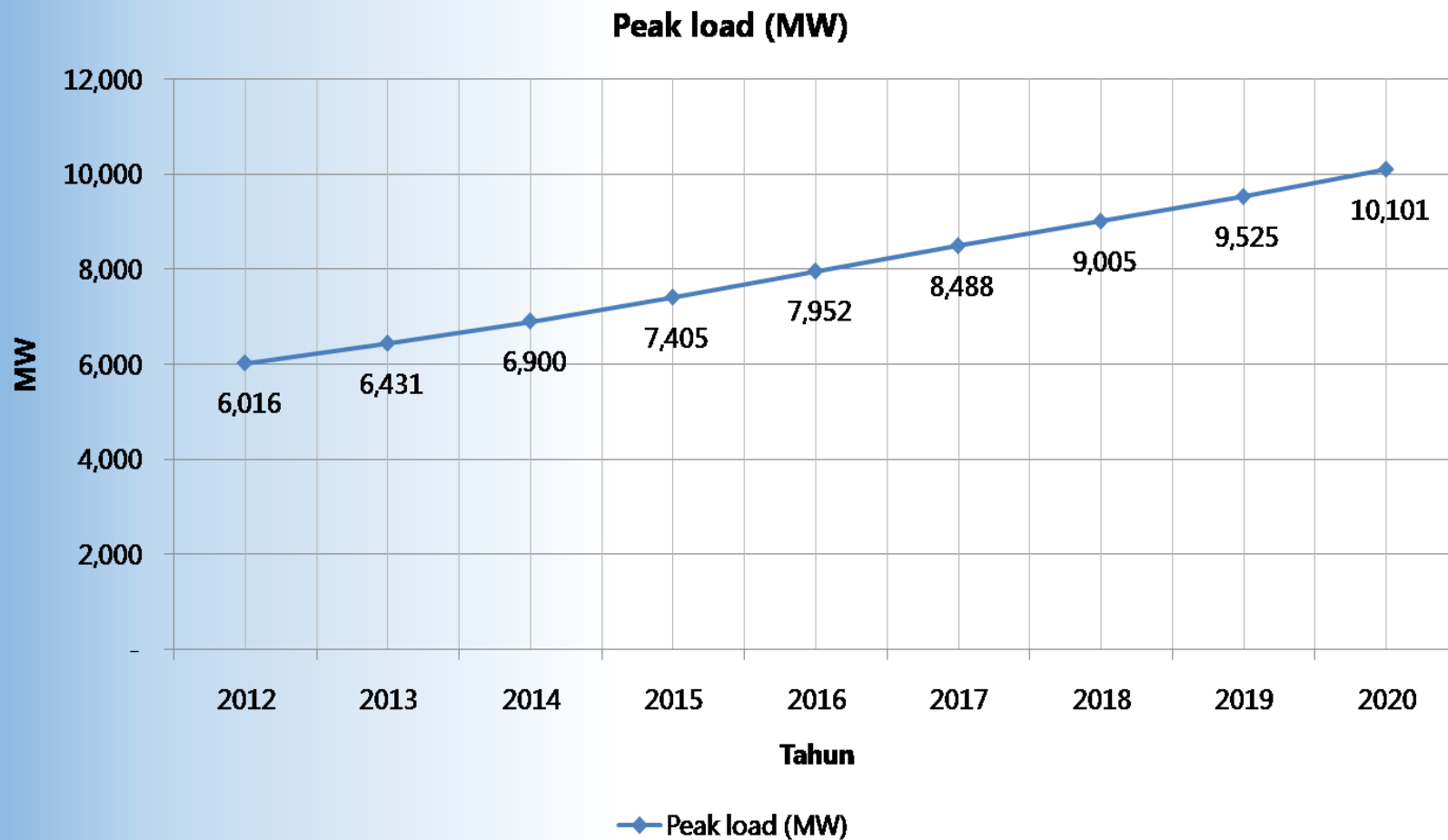
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ENERGI ADA UNTUK SEMUA

Proyeksi Kebutuhan Premium

Proyeksi Kebutuhan Premium Jawa Barat 2012-2025
per Sektor (BoE)



Proyeksi Peak Load



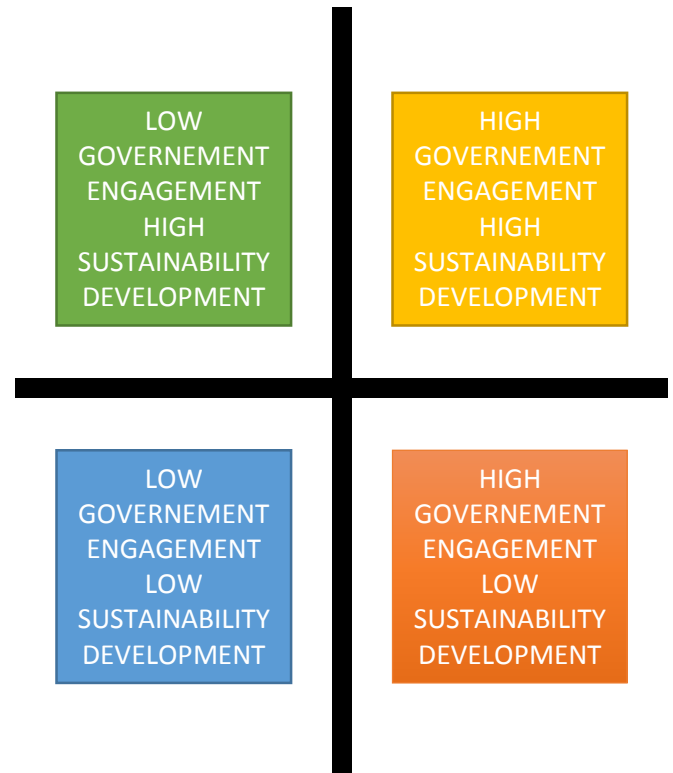
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI DAERAH



Pendekatan Penyusunan RUED-P

Pendekatan dengan 2 variabel yaitu *Government Engagement (GE)* & *Sustainability Development (SD)* - indikator tingkat emisi karbon dan berdasarkan tinggi rendahnya konten variabel tersebut, menghasilkan 4 Skenario:

1. Low GE High SD: Skenario “Jabar Hejo”: upaya pencapaian provinsi Jawa Barat menjadi Green Province dengan memperbesar partisipasi masyarakat dalam pencapaian target emisi karbon rendah;
2. High GE High SD: Skenario “Kahoyong Pamarentah – KP”: Pemerintah provinsi memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan memperbesar penyediaan dan konsumsi energi .
3. High GE Low SD: Skenario “Ngareuksak Lemah Cai”: Pertumbuhan ekonomi dibiarkan berjalan apa adanya tanpa intervensi pemerintah, demikian pula dengan emisi karbon yang ada.
4. Low GE Low SD: Skenario “Rereongan Wargi Sadaya” Didasari dari partisipasi masyarakat selain pemerintah dalam mempertahankan kualitas lingkungan.



Visi Misi Nilai Perencanaan Energi Jawa Barat

Visi :

Terpenuhinya kebutuhan energi Jawa Barat yang mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemanfaatan seluasnya potensi Energi Baru Terbarukan sebagai pemasok utama kebutuhan Energi Provinsi Jawa Barat sebagai Green Province.

Misi:

1. Menjamin ketersediaan energi (*Availability*).
2. Menjamin daya beli energi (*Affordability*)
3. Meningkatkan akses kepada berbagai macam jenis energi (*Accesibility*)
4. Memprioritaskan jenis-jenis energi yang dapat diterima masyarakat (*Acceptability*)

Semua Misi kemudian dilakukan pendetilan dan disusun serta kemudian “dibungkus” dalam suatu nilai kearifan lokal, khas Jawa Barat, seperti misal “*leuweung rusak, caina beak, jelema balangsak*”, yang dalam perencanaan energi mengandung arti bahwa penyediaan, pendistribusian dan penggunaan energi harus menjaga kelestarian lingkungan.



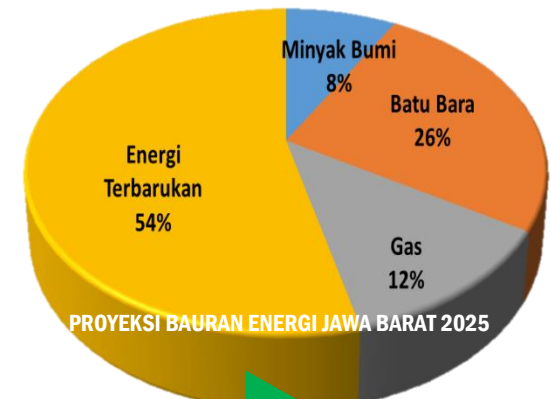
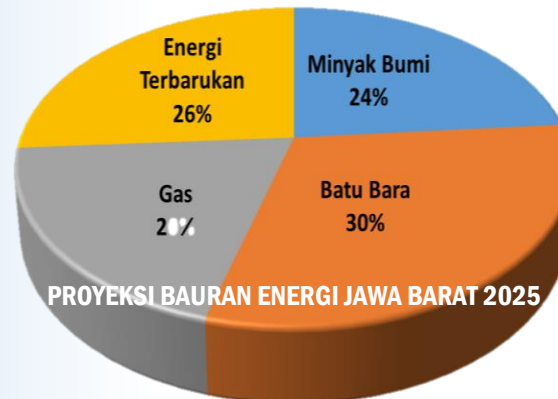
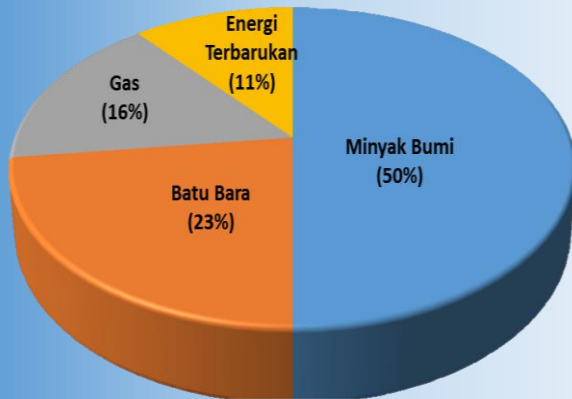
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH



TARGET BAURAN ENERGI JAWA BARAT VS SASARAN NASIONAL

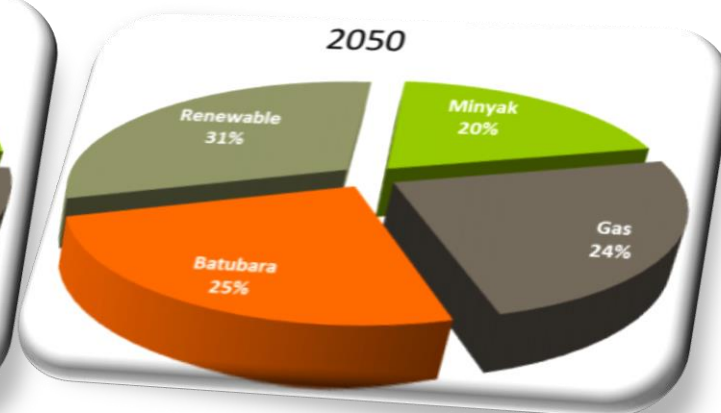
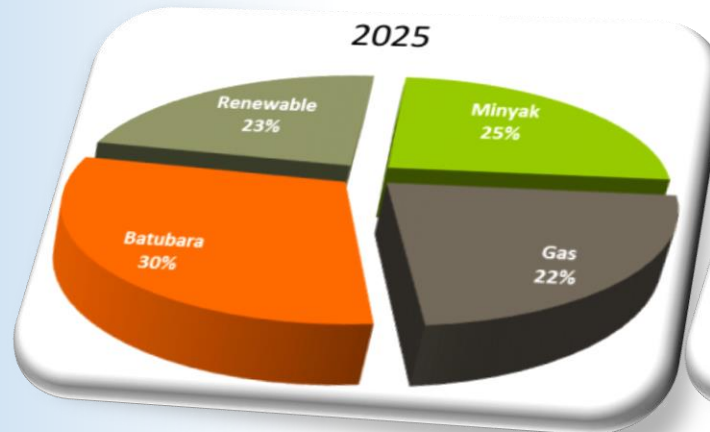
20

20/09/2016



PROYEKSI BAURAN ENERGI JAWA BARAT SKENARIO JABAR HEJO

TARGET NASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 ENERGI ADA UNTUK SEMUA

STRATEGI

- Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan (panas bumi, biomassa dan surya).
- Pemanfaatan energi baru di kawasan urban.
- Konservasi energi di kawasan perkotaan
- Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada energi baru dan terbarukan.

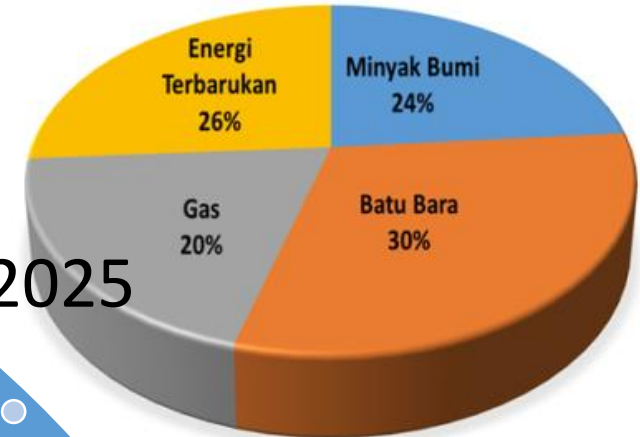
2015



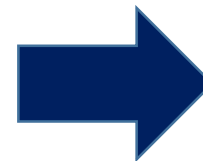
2025

2035

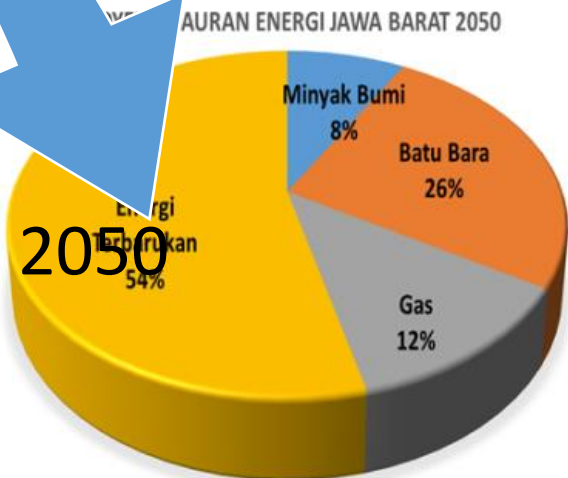
20/09/2016
PROYEKSI BAURAN ENERGI JAWA BARAT 2025



- Pemantapan pemanfaatan energi terbarukan (panas bumi, biomassa dan surya).
- Pemanfaatan energi baru di kawasan urban dengan penerapan teknologi
- Konservasi energi di kawasan perkotaan dengan penerapan teknologi tinggi.
- Peningkatan keberlanjutan akses masyarakat perdesaan pada energi baru dan terbarukan.



2040





PENUTUP

Catatan :

- RUED sebagai media perencanaan energi di daerah : menjadi acuan dalam pengelolaan dan kebijakan-kebijakan energi di daerah. Semua sektor penyedia dan pengguna energi di Daerah harus mengacu kepada RUED yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- Ketika RUED menjadi kunci penting dalam pengelolaan energi, maka penyusunannya harus menggunakan data/baseline yang tervalidasi, metodologi yang tepat, analisa dan pembahasan multistakeholders yang mencukupi, sehingga keluarannya bisa menggambarkan kondisi sebenarnya.
- Materi RUED-P terhadap RUEN dan RUED-K menjadi penting untuk disinkronisasikan sebelum ditetapkan sebagai sebuah produk hukum.
- Ketika RUED menjadi acuan pokok pengembangan energi di Daerah, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk memiliki diskresi yang mewakili bagi pengelolaan seluruh aspek keenergian di Daerah. Pemerintah Daerah harus memiliki kewenangan yang cukup bersifat koersif untuk mengawal agar para pihak dalam pengelolaan energi di Daerah akan berjalan sesuai dengan rencana. (Kondisi ini akan terkendala oleh terjadinya fragmentasi yang banyak dalam pengelolaan energi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, disisi yang lain Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola dan mengendalikan para pihak dan kepentingan yang ada)
- Dirasa penting untuk mengharmonisasi kembali urusan penyelenggaraan pemerintahan di sektor energi sebagai dasar penting bagi tiap unsur Pemerintahannya bekerja. Perlu kejelasan peran, tugas dan tanggung jawab secara rinci antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelibatan azas pendelegasian urusan menjadi salah satu pilihan bagi Pemerintah Daerah untuk bisa lebih mampu dalam melakukan pengelolaan sektor energi di daerah.





“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang” - Soekarno 1960 -